

SKRIPSI
PENGAWASAN TERHADAP USAHA PERTAMINA SHOP (PERTASHOP) DI
KOTA PADANG

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mendapatkan gelar sarjana hukum*

Oleh:

SEPTIAMI PUTRI

2110113096

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H., M.H

Hendria Fithrina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 30/PK-VII/IV/2025

	No. Alumni Universitas		Septiami Putri		No. Alumni Fakultas	
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bateh Rimbang / 13 September 2002		f. Tanggal Lulus : 20 Agustus 2025			
	b. Nama Orangtua : Tamril, Nurlina		g. Predikat Lulus : Dengan Pujian			
	c. Fakultas : Hukum		h. Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan			
	d. PK : Hukum Administrasi Negara		i. IPK : 3,82			
	e. No. BP : 2110113096		j. Alamat : Palupuh, Agam.			

**PENGAWASAN TERHADAP USAHA PERTAMINA SHOP (PERTASHOP)
DI KOTA PADANG**

(Septiami Putri, 2110113096, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)

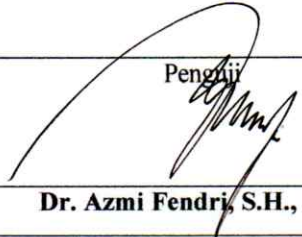
ABSTRAK

Pertamina Shop (Pertashop) sebagai bagian dari upaya distribusi energi skala kecil yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui PT. Pertamina (Persero). Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perdesaan, dalam praktiknya terjadi ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam aspek perizinan dan pengawasan operasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji norma hukum yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, serta pelaku usaha Pertashop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang hanya menjalankan fungsi administratif terbatas, seperti pemberian izin lokasi, pengurusan dokumen PBG dan SLF, tanpa kewenangan substantif dalam evaluasi teknis maupun pemberian sanksi. Sementara itu, kewenangan pengawasan dan perizinan usaha niaga BBM sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina. Ketidakhadiran peran aktif Badan Pengatur di tingkat lokal menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aspek keselamatan, distribusi energi, dan kepatuhan teknis Pertashop. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, kejelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna menciptakan pengawasan yang lebih efektif, responsif, dan sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pertashop, Izin, Pengawasan, Kewenangan, Energi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 20 Agustus 2025

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji	Penguji
		
Septiami Putri	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.	Amelia Zulfitri, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fitrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Septiami Putri	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Bateh Rimbang /13 th September 2002 b. Parents' Name : Tamril, Nurlina c. Faculty : Law d. Concentration : Administrative Law e. Student ID : 2110113096		f. Graduation Date : August 20 th 2025 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 4 years 0 month i. GPA : 3,82 j. Address : Palupuh, Agam.

**SUPERVISION OF PERTAMINA SHOP (PERTASHOP) BUSINESS
IN PADANG CITY**

(Septiami Putri, 2110113096, Concentration Program Administrative Law (CP VII), Faculty of Law, Andalas University, 2025)

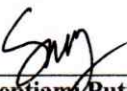
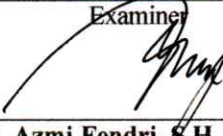
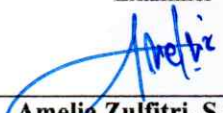
ABSTRACT

Pertamina Shop (Pertashop) as part of a small-scale energy distribution effort initiated by the central government through PT. Pertamina (Persero). Although this program aims to increase public access to fuel oil (BBM) in rural areas, in practice there is an imbalance of authority between the central and regional governments, especially in the aspects of licensing and operational supervision. This study uses an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, examining the applicable legal norms and their implementation in the field through interviews with the Energy and Mineral Resources (ESDM) Office of West Sumatra Province, and the Padang City Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP), as well as Pertashop business actors. The results of the study show that the Padang City Government only carries out limited administrative functions, such as granting location permits, managing PBG and SLF documents, without substantive authority in technical evaluation or sanctioning. Meanwhile, the authority to supervise and license fuel trading businesses is fully in the hands of the Central Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources, BPH Migas, and Pertamina. The absence of the active role of the Regulatory Agency at the local level has led to weak supervision of the aspects of safety, energy distribution, and technical compliance of Pertashop. This study recommends the need to strengthen regulations, clarify the division of authority between the central and regional governments, and improve cross-sector coordination to create more effective, responsive, and in line with the principle of decentralization in the government system.

Keywords: Local Government, Pertashop, Permits, Supervision, Authority, Energy

This minor thesis has defended in front of the examiner team at, August 20 2025.

Examiner,

Signature 	Examiner 	Examiner 
Septiami Putri	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn.	Amelia Zulfitri, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Administrative Law: **Hendria Fitrina, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: